



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN TRIWULAN II 2024



DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Juli 2024

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Maksud dan Tujuan.....	13
1.3. Tugas dan Fungsi.....	13
a. Sumber Daya Manusia.....	14
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	15
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Perikanan Budi Daya.....	17
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	18
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	24
IKU 1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang kawasan dan kesehatan ikan (orang).....	24
SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang direvitalisasi.....	25
IKU 2 Kluster tambak yang siap operasional (Kluster).....	25
IKU 3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan).....	27
IKU.4 Kawasan Perikanan Budi Daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan).....	29
SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....	30
IKU.5 Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)..	30
IKU.6 Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (paket).....	32
SS 4. Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan.....	33
IKU 7. Presentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun (%).....	33
IKU 8. Tingkat kualitas implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	35

IKU 9. Indeks pengendalian penyakit ikan (skala).....	38
IKU 10. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)	41
SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	41
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	44
IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	44
IKM.13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	46
IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	47
IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	48
IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	49
IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%).....	53
IKM.18. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	54
IKM.20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)...55	
BAB IV. PENUTUP.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023	14
Gambar 2. Potensi Perikanan Budi Daya	15
Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024	17
Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024	18
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024	19
Gambar 6. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerja Triwulan II Tahun 2024	20
Gambar 7. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024	123
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024	21
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan II Tahun 2024	234
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional(Kluster) Triwulan II Tahun 2024 .	245
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024.....	267
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan irigasi (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024	289
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan II Tahun 2024	30
Tabel 8. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan II Tahun 2024	311
Tabel 9. Poklina dan Paket PITAP Tahun Anggaran 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024.....	32
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)	32
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)	33
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan II Tahun 2024.....	35
Tabel 14. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan II Tahun 2024	36
Tabel 15. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)	38
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Triwulan II Tahun 2024	38
Tabel 17. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan II Tahun 2024	39
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan II Tahun 2024.....	41
Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan II Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB.....	41
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024	44
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2024.....	45
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024.....	46
Tabel 23. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Eselon II Ditjen Perikanan	

Budi Daya Triwulan II Tahun 2024	47
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024.....	48
Tabel 25. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024.....	49
Tabel 26. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024	50
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	50
Tabel 28. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024.	51
Tabel 29. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024	52
Tabel 30. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun 2024.....	52
Tabel 31. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan II Tahun 2024.....	53
Tabel 32. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024.....	53
Tabel 33. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan II Tahun 2024	55
Tabel 34. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan II Tahun 2024.....	55
Tabel 35. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024.....	56
Tabel 36. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024.....	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan II Tahun 2024, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024:

a) Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (i) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (ii) Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan (iii) Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%).

b) Terdapat 2 (dua) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategi yang capaiannya dibawah target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SS4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%) dan

SS5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%).

c) Terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja dari 5 (lima) Sasaran Strategi yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan II, yaitu:

SS1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang).

SS2. Meningkatkan kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (i) Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), (ii) Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (kawasan) dan (iii) Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan).

SS3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : (i) Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%) dan (ii) Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (paket).

SS4. Meningkatkan kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan, dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu: (i) Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan*

(NRMP) (%), (ii) Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%), (iii) Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) dan (iv) Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)

SS5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan 4 (empat) indikator kinerja) yaitu : (i) Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai), (ii) Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (iii) Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) dan (iv) Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 15,79% Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, 10,52% Indikator Kinerja di bawah target yang ditetapkan, dan 73,68% Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan II. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “Istimewa” dengan nilai 118,54. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 5. Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%),** telah disalurkan excavator sebanyak 11 unit kepada kelompok penerima di 11 Kabupaten yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima barang (BAST).
2. **IKM 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%),** telah dilakukan input bukti keikutsertaan pegawai lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk mendorong nilai Kompetensi melalui aplikasi MyASN.
3. **IKM 12. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%),** telah dilakukan penyelesaian sebagian temuan Inspektorat Jenderal namun masih perlu tindak lanjut LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 pada Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terkait dengan kelengkapan bukti dukung terhadap sisa temuan (satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan Rp 41.426.478,00).
4. **IKM 14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%),** telah disampaikannya penyebarluasan informasi menggunakan platform *Portal Collaboration Office* secara rutin.
5. **IKM 16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%),** telah dilakukan upaya peningkatan layanan ketatausahaan di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan
6. **IKM 17. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%),** telah dilakukan upaya dalam percepatan penyerapan anggaran terutama pada kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu mereformulasi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020 - 2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan target kinerja tahun 2024, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 merupakan salahsatu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan selama Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

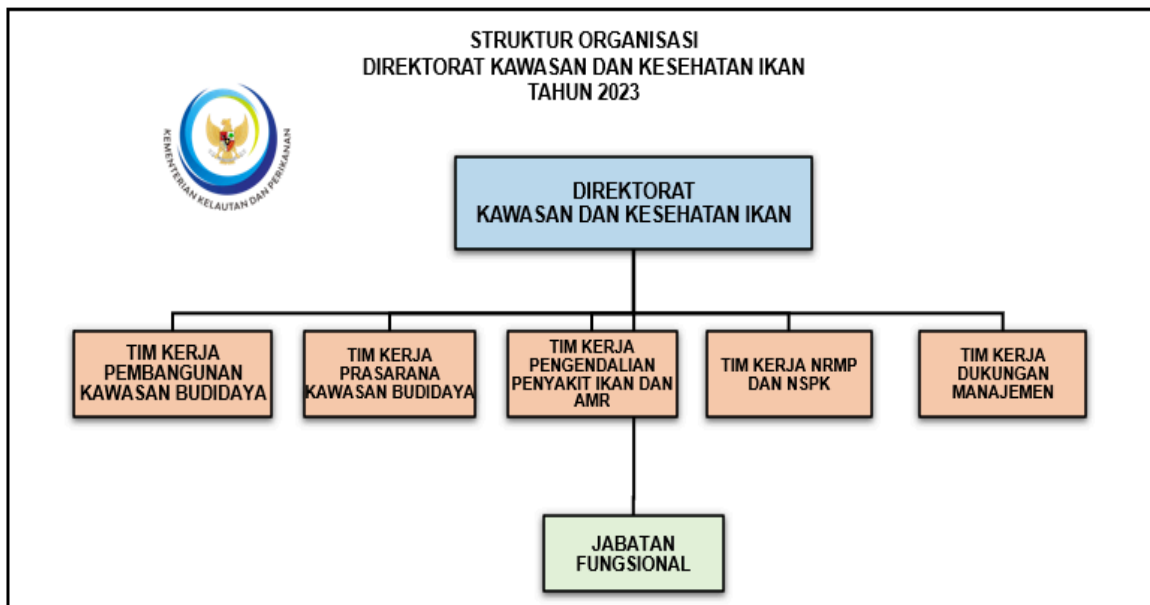
1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan,serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan,serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan

- pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024

No.	Nama Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	1
2	Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya	-	3	9	-	-	-	12
3	Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya	-	2	7	-	-	-	9
4	Tim Kerja Pengendalian Penyakit Ikan dan AMR	-	2	7	-	-	-	9
5	Tim Kerja NRMP dan NSPK	-	3	4	-	-	-	7
6	Tim Kerja Dukungan Manajemen	-	-	4	2	6	-	12
7	Pengawas Perikanan Utama	1	-	-	-	-	-	1

No.	Nama Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
JUMLAH		1	11	30	2	6	-	51

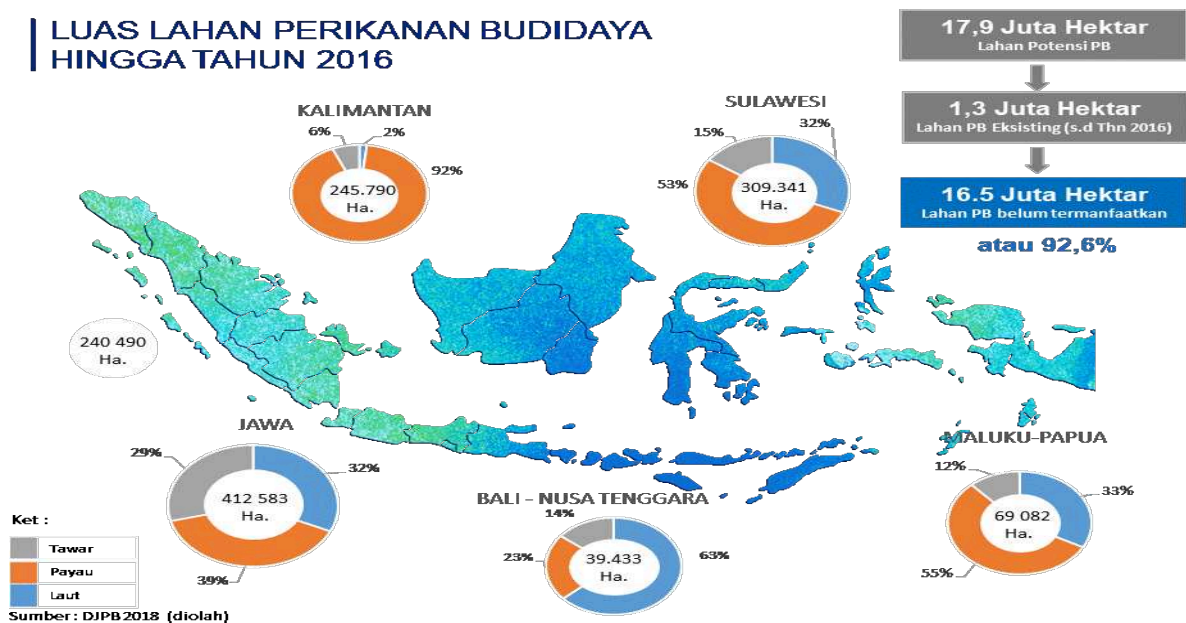
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencapai 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil 40 orang,
- Pegawai PPPK 4 orang dan
- Pegawai Tenaga Kontrak 7 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tersebar di Timja Dukungan Manajemen sebanyak 3 (tiga) orang, Timja Pembangunan Kawasan Budi Daya 2 (dua) orang, dan Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya sebanyak 2 (dua) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budi daya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 2. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang pencapaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 selama kurun waktu April – Juni 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan

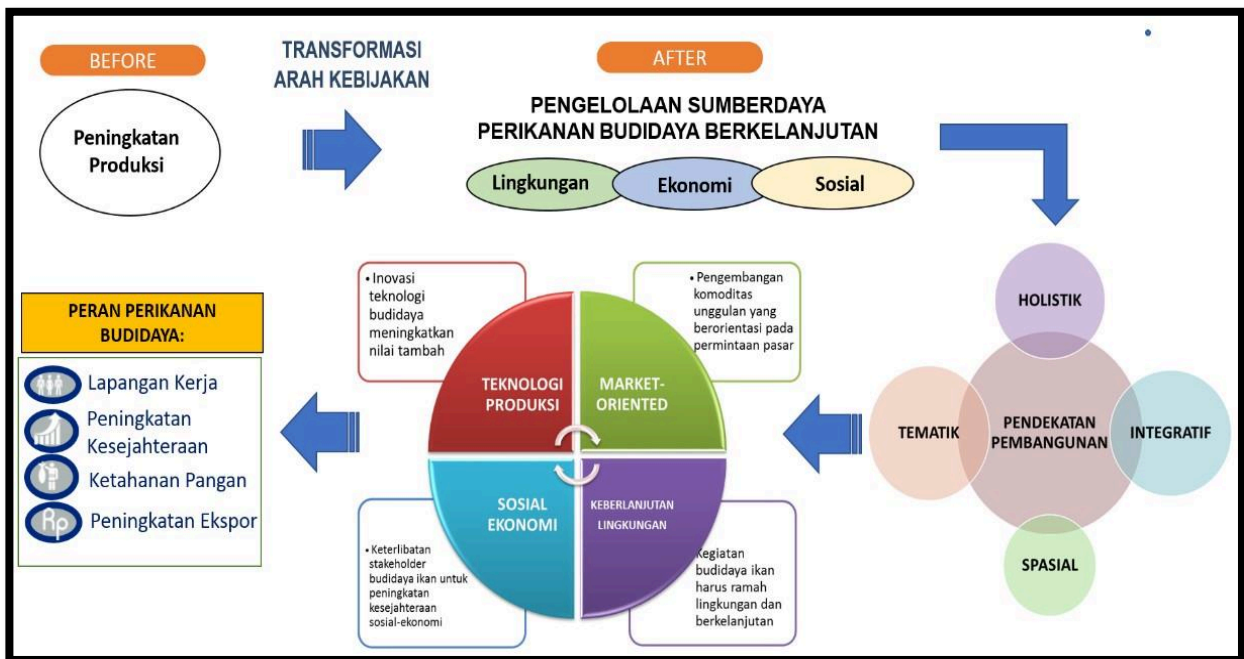
realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana

disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Orang)	680
		2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	9
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	3. Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1
		4. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	8
		5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang dimanfaatkan Masyarakat (%)	75
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10
		7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (Persen)	94
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (Persen)	75
		9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2
		10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	35
		11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82
		13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	
		15. Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		16. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		18. Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	98		

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	429,050,000,000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	678,640,000
Total Anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024		429,728,640,000,-

Jakarta, 22 Februari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan



Tb. Haeru Rahayu



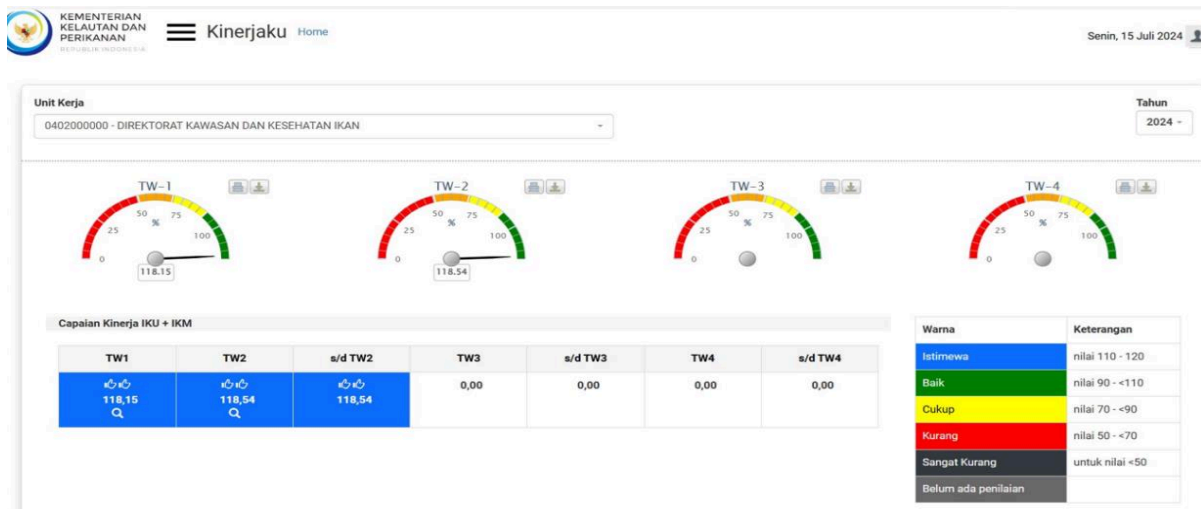
Tinggal Hermawan

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan

implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 6. Schreenshoot NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerjaku Triwulan II Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan kawasan dan kesehatan ikan pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 5 (lima) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II	%	Peng-Hitungan
1	Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)	680	0	0	Tahunan
2	Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi	2	Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	9	0	0	Tahunan
		3	Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1	0	0	Tahunan
		4	Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)	8	0	0	Tahunan
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5	Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%)	75	0	0	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II	%	Peng-Hitungan
		6	Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10	0	0	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (%)	94	0	0	Tahunan
		8	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)	75	42,86	57,15	Triwulan
		9	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2	0	0	Tahunan
		10	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)	35	0	0	Tahunan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85	83,49	98,22	Semesteran
		12	Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82	0	0	Tahunan
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	95,65	119,56	Triwulanan
		14	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	94	133,33	>120	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II	%	Peng-Hitungan
			(%)				
		15	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	0	0	Tahunan
		16	Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	99,18	>120	Triwulan
		17	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	91	0	0	Tahunan
		18	Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	1	0	0	Tahunan
		19	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	98	48,74	49,73	Triwulan

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) didefinisikan Jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan kawasan dan

kesehatan ikan sebanyak 680 orang, yang meliputi: Excavator sebanyak 480 orang dan (b) PITAP sebanyak 200 orang.

Penanggung Jawab Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) berada di Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya dan Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya. Pengukuran penghitungan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) dihitung berdasarkan tenaga Kerja yang terlibat langsung pada kegiatan di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang), dengan kriteria sebagai berikut:

- Dalam mengoperasikan 1 unit excavator membutuhkan 5 orang tenaga kerja terdiri dari 2 orang pengelola dari kelompok, 1 orang operator, 1 orang mekanik, 1 orang penjaga malam. Sehingga untuk 96 unit excavator melibatkan tenaga kerja sebanyak 480 orang (96 unit x 5 orang). Untuk pengelola, operator, dan penjaga malam bekerja selama alat beroperasi, sedangkan mekanik bekerja saat excavator sedang di service/perbaiki.
- 1 paket PITAP melibatkan kelompok dimana 1 kelompok minimal terdiri dari 20 orang. Sehingga untuk 10 paket PITAP melibatkan tenaga kerja sebanyak 200 orang (10 paket x 20 orang).

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020 - 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	680	-	-

Pengukuran Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan II Tahun 2024 dilakukan secara Tahunan, sehingga capaiannya baru diketahui pada akhir Tahun. Pada triwulan II, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) belum terealisasi disebabkan pelaksanaan bantuan sarana kawasan budidaya, dan PITAP masih dalam proses pengerjaan.

SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)

Kluster tambak yang siap operasional meliputi pembangunan kluster tambak udang dan revitalisasi tambak bandeng dengan kriteria sebagai berikut:

- Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining).
- Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng yang difasilitasi dengan sarana produksi berupa benih dan pakan ikan.

Target indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional, terdiri dari : (a) pembangunan kluster tambak udang, dengan target 2 kluster dan (b) revitalisasi kluster tambak bandeng, dengan target 7 kluster. Jumlah usaha budidaya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak 9 kluster, terdiri dari : 2 kluster tambak udang dan 7 kluster tambak bandeng dikerjakan oleh UPT DJPB dengan rincian : **(a) BPBAP Situbondo**: 1 tambak udang di Kabupaten Pangandaran dan 1 tambak bandeng di Kabupaten Gresik; **(b) BBPBAP Jepara**: 1 tambak udang di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan 4 tambak bandeng di Kabupaten Tangerang/Mauk; **(c) BLUUPB Karawang**: 1 tambak bandeng di Kabupaten Karawang; **(d) BPBAP Takalar**: 1 tambak bandeng di Kabupaten Pangkep. Penghitungan capaian Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah kluster tambak udang dan bandeng siap operasional merujuk pada definisi siap operasional yang pengukurannya dilakukan akhir tahun.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	9	-	-

Berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), maka beberapa upaya yang telah dilakukan selama Triwulan II meliputi :

a. Penetapan Kelompok

Menetapkan kelompok penerima bantuan kluster tambak yang berlokasi di 5 (lima) Kabupaten, yang meliputi :

1. Penetapan kelompok penerima bantuan kluster udang yaitu:
 - a. Kelompok Anak Langkat Bertuah di Kabupaten Langkat; dan

- b. Kelompok Vannamei Putra Pamotan di Kabupaten Pangandaran.
2. Penetapan kelompok penerima bantuan kluster bandeng berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya yaitu:
 - a. Kelompok Makmur Bahari di Kabupaten Gresik;
 - b. Kelompok Mina Payau Mandiri dan Sukses Bersama di Kabupaten Karawang;
 - c. Kelompok Sungguminasa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Kluster Udang

Perkembangan pembangunan kluster udang berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, yang meliputi :

- dimulainya pelaksanaan pembangunan kluster udang di Kabupaten Langkat dengan progress 58,2% dengan serapan anggaran Rp. 3.203.587.221,
- telah dilaksanakan pembangunan kluster udang di Kabupaten Pangandaran dengan progress 30,28% dengan serapan anggaran Rp. 1.665.522.857,
- melaksanakan penyelesaian kontruksi tambak, pemasangan instalasi di kluster Kabupaten Pangandaran,
- melanjutkan sisa pekerjaan berupa pekerjaan kontruksi tambak, pemasangan instalasi listrik, pembangunan bangsal dan rumah panen, dan perbaikan saluran di kluster udang Kabupaten Langkat.

c. Pelaksanaan Pembangunan Kluster Bandeng

Pembangunan kluster bandeng yang berlokasi di 4 (empat) kabupaten, yang meliputi:

- Kabupaten Gresik, dengan progress pekerjaan 95,6% dengan serapan anggaran Rp. 669.256.600,
- Kabupaten Tangerang, dengan progress pekerjaan 53,2% dengan serapan anggaran Rp. 1.543.926.106,
- Kabupaten Pangkep, dengan progress pekerjaan 95% dengan serapan anggaran Rp. 665.000.000,-,
- Kabupaten Karawang dengan progress pekerjaan 21,30% dengan serapan anggaran Rp. 149.070.188,-

Pada Triwulan II diharapkan kelanjutan pekerjaan pada kluster udang dan bandeng dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kluster udang kontruksi tambak dan bangunan pendukung yang masih dalam progress penyelesaian. Selain itu, dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara terus menerus agar kendala yang ditemukan dilapangan dapat segera ditangani.

IKU.3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya merupakan lokasi yang direncanakan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem

pengelolaan air guna mendukung peningkatan perikanan budi daya. Perencanaan terhadap perbaikan sistem tata air tambak dalam pembangunan kawasan budi daya perikanan mengacu pada rencana *Detail Engineering Design* (DED) kawasan tambak.

Cara pengukuran Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan budi daya udang yang akan direncanakan saluran irigasinya. Indikator kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) merupakan indikator yang baru dimunculkan pada Tahun 2024 dan pengukurannya dilakukan secara Tahunan. Perolehan sumber data terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut berasal dari Tim kerja Prasarana Kawasan Budi daya.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	1	-	-

Pada Triwulan II untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan nomor 52/DJPB.2/PB.220/I/2024 Tentang Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan ditetapkan perubahannya sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan nomor 3652/DJPB.2/PB.220/IV/2024 Tentang Perubahan Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Mei 2024;
- b. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS serta Draft Rancangan Kontrak. Dokumen Pengadaan ini telah disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Nota Dinas Nomor 38/DJPB.2/PB.220/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 untuk dapat dilanjutkan dengan metode lelang umum.
- c. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 Januari 2024;
- d. Telah dilakukannya koordinasi terkait dengan lokasi prioritas pekerjaan pada tanggal

25 Januari 2024 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

- e. Menerima Nota Dinas dari UKPBJ KKP Nomor 321/PBJ.4.2/PL,460/II/2024 tanggal 27 Februari, dimana dijelaskan bahwa pemenang lelang adalah PT. Sapta Adhi Pratama dengan nilai klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.116.819.840,00.
- f. Telah dilakukan Persiapan Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa dan menerbitkan Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I Nomor 2102/DJPB.2/PB.220/ SPPBJ/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- g. Dilanjutkan dengan ditandatanganinya Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 2153/DJPB.2/K/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2154/DJPB.2/SPMK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- h. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan kontrak pada tanggal 14 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu;
- i. Penyedia telah menyerahkan Laporan Konsepsi Perancangan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin I Nomor 01/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/IV/2024 Tanggal 17 April 2024;
- j. Telah dilakukan Pembayaran Termin I sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 3251/DJPB.2/PL.420/BAP-T1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 111.681.984,-;
- k. Penyedia telah menyerahkan Laporan Pra Rancangan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin II Nomor 05/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 ;
- l. Telah dilakukan Pembayaran Termin II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 4571/DJPB.2/PL.420/BAP-T2/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 sebesar Rp. 223.363.968,-;
- m. Telah dilakukan pembahasan Laporan Pengembangan Rancangan pada tanggal 25-28 Juni 2024.

Permasalahan yang dihadapi adalah telah dikeluarkannya peraturan terbaru dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga perlu rencana aksi/tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu mempelajari dan mencermati kembali dalam penyusunan AHSP sesuai dengan peraturan terbarunya.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II baru terserap 30,6% atau sebesar Rp. 459.395.752,- dari pagu Rp1.500.000.000.

IKU.4 Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)

Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Perikanan Budi Daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi tambak tertier merupakan kawasan yang memperoleh dampak dari kegiatan PITAP.

Capaian indikator kinerja tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP dengan target 8 kawasan. Penanggung jawab Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) berada di Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	8	-	-

Cara pengukuran Indikator kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) dilakukan dengan menghitung jumlah Kawasan perikanan budi daya yang memperoleh dampak pengairan irigasi tambak tertier dari kegiatan PITAP. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut baru dapat diketahui pada Triwulan III sesuai dengan target yang telah direncanakan dan serah terima pekerjaan PITAP.

SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU.5 Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)

Indikator persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%) merupakan alat berat excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan agar meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan (%) sebesar 75% yang diukur pada akhir tahun. Pada tahun 2024, nomenklatur Indikator tersebut merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja tahun 2023 yaitu Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%). Sebagai dampaknya, maka capaian

pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2023. Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase realisasi bantuan excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan realisasi excavator yang telah diterima kelompok penerima. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan laporan pemanfaatan excavator ke masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Barang (Excavator). Jumlah bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat pada Tahun 2024 berjumlah 96 unit. Pencapaian indikator sarana kawasan budidaya yang disalurkan berupa excavator menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	75	-	-

Capaian Indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) baru akan dilakukan pengukurannya pada akhir Tahun. Secara umum tahapan pendistribusian excavator ke masyarakat, dilakukan melalui tahapan : (1) identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL); (2) verifikasi dan penetapan CPCL; (3) persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (4) serah terima bantuan excavator; dan (5) penyusunan laporan pemanfaatan oleh kelompok penerima bantuan excavator. Selama Triwulan II, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%), antara lain: (i) dilakukannya verifikasi terhadap Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) ke kelompok masyarakat berdasarkan pengajuan proposal CPCL dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Excavator Tahun 2024. Hingga tanggal 30 Juni 2024, SK Penerima Bantuan Excavator telah ditetapkan terhadap 33 CPCL dengan keterangan serah terima alat berat excavator telah selesai dilaksanakan ke 11 kelompok masyarakat dan proses pengiriman unit sedang berlangsung untuk 12 kelompok masyarakat, (ii) pengadaan barang dan jasa pengiriman alat berat melalui e-katalog dengan memperhatikan ketentuan terkait penggunaan produk dalam negeri nilai TKDN dan BMP dan kualifikasi usaha kecil serta koperasi (UMKK) dan (iii) serah terima alat berat excavator yang telah direalisasikan ke 11 kelompok penerima bantuan di 11 Kabupaten dan dilakukan commissioning oleh mekanik dari penyedia. Pada saat serah terima, dijelaskan juga mengenai pelaporan pemanfaatan alat berat excavator terhadap rencana yang sudah dituangkan dalam proposal yang diajukan.

Tabel 8. Daftar Excavator yang telah Didistribusikan ke Masyarakat Hingga Triwulan II Tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Progres Kegiatan
1	Aceh	Aceh Tenggara	Pokdakan Tojung Maju	Selesai BAST
2	Aceh	Aceh Utara	Keuramat Jaya Kilometer Enam	Selesai BAST
3	Sumatera Utara	Samosir	Ringgas Mangula	Selesai BAST
4	Lampung	Tulang Bawang	Pokdakan Windu Sejahtera	Selesai BAST
5	Jawa Barat	Cianjur	Koperasi Syariah Al Mubarakah	Selesai BAST
6	Jawa Barat	Indramayu	Koperasi Bahari Tiga Serangkai	Selesai BAST
7	NTT	Kupang	Pokdakan Sejahtera	Selesai BAST
8	Kalimantan Barat	Sambas	Pokdakan Kompak	Selesai BAST
9	Sulawesi Selatan	Bone	Pokdakan Tunas Muda	Selesai BAST
10	Sulawesi Selatan	Luwu	Yayasan Ruhama Pondok Pesantren Hidayatullah	Selesai BAST
11	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Maddeppa Teppaja	Selesai BAST

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) diantaranya: keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi penerima dan kendala terkait pendaftaran kusuka perorangan/korporasi oleh penyuluh. Rencana aksi yang akan dilakukan dalam triwulan selanjutnya yaitu koordinasi antara kelompok, dinas perikanan, dan penyuluh lebih intens terutama di lokasi yang jaringan internetnya terbatas, serta membantu penyampaian terkait kendala kusuka oleh admin kusuka yang ada di Pusat. Upaya yang akan dilakukan dalam memenuhi realisasi pada triwulan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan kelompok, dinas, beserta penyuluh guna kelengkapan proposal yang diajukan untuk bantuan excavator.

Serapan pagu anggaran dalam upaya mencapai indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) hingga Triwulan II sudah mencapai 62.24% yakni Rp. 80.416.254.174,- dari pagu anggaran Rp. 129.200.000.000,- yang dialokasikan.

IKU.6 Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi sebesar 10 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan banyaknya saluran irigasi tambak tersier yang direhabilitasi dengan perolehan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya. Indikator Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket) merupakan penyesuaian dari indikator yang ditetapkan Tahun 2023 yaitu : Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%).

Tabel 9. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
0	0	0	55	0	-	10	0	0

Pada Tahun 2023, Indikator kinerja yang ditetapkan terkait pekerjaan PITAP yaitu: Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%), dengan target 80%. Akan tetapi, terkait dengan target kegiatan PITAP pada Tahun tersebut ditetapkan sebanyak 55 paket dengan realisasi 100%. Realisasi kegiatan PITAP baru akan dihitung pada Triwulan sejalan dengan diteruskannya Berita Acara Serah Terima (BAST). Secara target tahunan, lokasi penerima PITAP direncanakan di 8 (delapan) kabupaten sesuai dengan kontrak kegiatan PITAP pada tanggal 15 dan 28 Mei 2024.

Hingga akhir triwulan II, anggaran yang telah terserap dalam mencapai IKU Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%) yaitu Rp. 2.087.863.800 dari pagu Rp. 2.500.000.000 atau 83.51 %. Sisa anggaran yang ada, akan dialokasikan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak kegiatan PITAP 2024.

SS.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)

Indikator kinerja Persentase NSPK di Bidang Kesehatan Ikan merupakan dokumen NSPK yang disusun oleh Tim Kerja NRMP dan NSPK yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. NSPK di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu NSPK di bidang residu dan bidang penyakit ikan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 75%. Pengukuran Indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kumulatif dengan target kumulatif dalam

renstra dalam kurun waktu 2020-2024.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023. Target dokumen NSPK yang akan dihasilkan pada Tahun 2024 sebanyak 7 dokumen bidang kesehatan ikan berupa Peraturan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNI bidang kesehatan ikan. Pengukuran capaian Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan yang disusun (%) dilakukan secara triwulanan. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
1	Bidang Residu	6	Revisi Peraturan Menteri (1 dokumen), Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2 dokumen), dan RSNI3 (3 dokumen)
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (1 dokumen)
	Total	7	

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
29	42,86	147,79	-	-	-	75	57,15	-

Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 147,79% yang diperoleh berdasarkan realisasi NSPK sebesar 42,86% dibandingkan dengan target triwulanan. Selanjutnya, secara realisasi jumlah NSPK yang telah disusun di bidang kesehatan ikan berjumlah 3 dokumen, yaitu:

- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 60 tahun 2024 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Rencana Surveilans Resistensi Antimikroba Tahun 2024.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan II Tahun 2024

NO	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan II (Dokumen)	Target Triwulan II (%)	Realisasi Triwulan II (Dokumen)	Capaian Triwulan II (%)
1	Bidang Residu	6	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	1	29	2	42.86
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	1		1	
	JUMLAH	7		2		3	

Dalam upaya mendorong tercapainya Indikator kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%), telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya: (i) Konsultasi Publik Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsu yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, yang akan dilanjutkan pada Tahap Harmonisasi di Kemenkumham, dan (ii) Rapat Teknis RSNI 1 bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tanggal 29-31 Mei 2024. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian awal kegiatan Perumusan RSNI yang akan dilanjutkan dengan rapat teknis 2 dan konsensus. RSNI yang dibahas pada rapat konsensus merupakan RSNI 3 yang akan dihitung menjadi capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%). Pada tahun 2024, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mengajukan 3 judul RSNI melalui Sekretariat Komtek 65-07, seperti pada tabel berikut:

Tabel 13. Judul dan Konseptor Rapat Teknis RSNI 1 bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan 2024

No.	Judul	Konseptor	Instansi	Keterangan
1.	Nekropsi ikan bersirip untuk tujuan diagnosis penyakit	Wiwin Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7907:2013
2.	Metode pemeriksaan penyakit pada ikan bernilai tinggi tanpa mematikan (<i>non-lethal</i>)	Wiwin Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7955:2014
3.	Uji kesehatan benur penaeid siap tebar secara laboratoris	Sri Murti Astuti	BBPBAP Jepara	Revisi SNI 7957:2014

Anggaran kegiatan perumusan RSNI bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan telah terealisasi Rp. 32.492.000,- dari Pagu Rp. 250.001.000,- atau sebesar 13%.

IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%)

Tingkat kualitas implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian residu nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas terhadap kinerja implementasi terhadap NRMP. Pelaksana kegiatan NRMP berada di 26 Provinsi dengan obyek monitoring residu berupa komoditas bandeng, lele, nila, patin, dan udang dengan target sampel monitoring residu secara nasional berjumlah 4.000 sampel. Penanggung jawab indikator kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP berada di Tim kerja NRMP dan NSPK.

Pelaksana kegiatan monitoring residu melalui kegiatan pengambilan sampel hingga pengujian sampel di 26 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Capaian diukur berdasarkan data yang disajikan di dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu (SIMPR) dengan mengukur aspek kesesuaian, kepatuhan dan ketercapaian. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan melakukan penilaian terhadap 3 aspek, sebagai berikut:

- 1. Aspek Kesesuaian (bobot 30%),** yaitu evaluasi kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi:
 - Kesesuaian Target Sampel masing-masing Provinsi (Implementasi – dokumen NRMP)
 - Kesesuaian Target Lokasi monitoring residu pada unit pembesaran dan pembenihan (Implementasi – dokumen NRMP).
- 2. Aspek Kepatuhan (bobot 30%),** yaitu evaluasi terhadap SOP terhadap (a) penginputan data monitoring residu pada aplikasi SIMPR, (b) Kriteria pengambilan sampel dan (c) pemenuhan mekanisme jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian (*Non Compliance*);
- 3. Aspek ketercapaian (bobot 40%),** diukur berdasarkan capaian terhadap target sampel di masing-masing Provinsi.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (NRMP)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Target Renstra 2020 – 2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	94	-	-

Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) merupakan indikator baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023 yang merevisi Indikator sebelumnya yaitu Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%). Capaian indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) pada Bulan Maret belum dapat diketahui disebabkan pengukurannya baru diketahui pada akhir tahun.

Indikator kinerja monitoring residu yang dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2024 berjumlah 26.000 sampel, namun target sampel tersebut mengalami penurunan menyesuaikan ketersediaan anggaran Tugas Peantuan di 26 Provinsi. Pada tahun 2024, secara jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 4.000 sampel namun hingga akhir Triwulan II belum terealisasi disebabkan blokir anggaran Tugas Peantuan belum dibuka. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu yang sebelumnya melalui Dana Dekonsentrasi kemudian menjadi Tugas Peantuan. Hal tersebut membutuhkan tahapan yang harus dilakukan Satker Tugas Peantuan di Dinas Provinsi agar anggaran dapat dimanfaatkan, antara lain : Penetapan PPK, mengangkat bendahara, hingga mengajukan pembukaan rekening Virtual Account ke KPPN yang selanjutnya dilaporkan pada aplikasi SPRINT. Upaya yang dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau dan mengkordinasikan secara intensif upaya yang harus dilakukan Satker Dinas KP di 26 Provinsi dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Tugas Peantuan.

Tabel 15. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan II Tahun 2024

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Aceh	Udang	133	0	0
2	Sumatera Utara	Udang	118	0	0
		Nila	47	0	0
3	Sumatera Barat	Udang	20	0	0
		Nila	38	0	0
4	Riau	Udang	22	0	0
		Patin	55	0	0
5	Jambi	Patin	55	0	0
6	Bangka Belitung	Udang	59	0	0
7	Sumatera Selatan	Udang	109	0	0
		Patin	51	0	0
8	Bengkulu	Udang	42	0	0
9	Lampung	Udang	385	0	0
10	Banten	Udang	46	0	0
11	Jawa Barat	Udang	311	0	0
		Lele	94	0	0
		Nila	67	0	0
12	Jawa Tengah	Udang	125	0	0
		Nila	73	0	0
13	DI Yogyakarta	Udang	42	0	0
14	Jawa Timur	Udang	264	0	0
		Bandeng	72	0	0
		Nila	73	0	0
		Lele	73	0	0
15	Bali	Udang	57	0	0
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	0	0
17	Kalimantan Barat	Udang	60	0	0
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	0	0
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	0	0
		Patin	34	0	0
20	Kalimantan Timur	Udang	95	0	0
21	Kalimantan Utara	Udang	76	0	0

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	0	0
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	0	0
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	0	0
		Bandeng	67	0	0
25	Sulawesi Barat	Udang	99	0	0
26	Gorontalo	Udang	85	0	0
			4000	0	0

Dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) telah dilakukan beberapa rencana aksi, seperti: (i) Penyusunan *annual report 2023* dan *National residu monitoring plan* (NRMP) 2024 yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024 (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka verifikasi implementasi pengendalian residu (Pusat) tahun 2024 telah terealisasi sebesar 56.28 % atau Rp49.615.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 88.156.000,-.

IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan didefinisikan tingkat serangan penyakit ikan pada wilayah tertentu yang ditunjukkan dengan warna hijau, kuning dan merah pada peta sebaran penyakit ikan. Tingkat serangan penyakit ikan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan monitoring penyakit ikan yang dilakukan di 34 Provinsi yang dilaporkan oleh operator SSMPI Dinas Perikanan Provinsi melalui SSMPI online. Jumlah sampel penyakit ikan yang dimonitor untuk mengetahui tingkat serangan penyakit ikan sebanyak 755 sampel.

Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Penghitungan indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan bersifat maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi semakin baik.

Tabel 16. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
1	Berat	≥ 60 %	Merah	1
2	Sedang	30 – 60 %	Kuning	2
3	Ringan	≤ 30 %	Hijau	3

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatkan kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Indeks serangan penyakit ikan (Skala)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	2	-	-

Monitoring penyakit ikan melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2024 dialokasikan kepada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2024 diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring penyakit ikan yang pengukurannya dilakukan secara tahunan.

Monitoring penyakit ikan dilakukan melalui anggaran TP di 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan direncanakan dilakukan terhadap 17 penyakit ikan yaitu *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM-EHP)*, *Viral encephalopathy and retinopathy (VER/VNN)*, *Enteric septicemia of catfish (ESC)*, *Motile Aeromonas septicemia (MAS)*, *Infection with tilapia lake virus (TiLV)*, *Infection with Megalocytivirus*, *Red sea bream iridoviral disease (RSID)*, *Infection with infectious myonecrosis (IMNV)*, *Infection with white spot syndrome virus (WSSV)*, *Streptococcosis (Streptococcus agalactiae)*, *Streptococcosis (Streptococcus iniae)*, *Infection with koi herpesvirus (KHV)*, *Red sea bream iridoviral disease*, *Fish mycobacteriosis (Mycobacterium fortuitum)*, *Vibriosis* dan *Ichthyophthiriasis (Ichthyophthirius multifiliis)*.

Pelaksanaan surveilan/monitoring penyakit ikan dilakukan di 34 provinsi dengan target sampel yang diambil dan diuji sebanyak 755 sampel. Realisasi sampel pada triwulan II berjumlah 38 sampel atau sekitar 5,03% dari target tahunan. Pada triwulan II, pengambilan sampel baru dilakukan oleh 5 Provinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, sedangkan 29 Provinsi lainnya belum melakukan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan. Secara detail jumlah sampel untuk setiap provinsi yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 18. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan II Tahun 2024

No	Provinsi	Target Tahun2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase (%)
1	Aceh	27	0	0
2	Sumatera Utara	23	0	0
3	Sumatera Barat	26	0	0
4	Riau	26	6	23,07
5	Bengkulu	23	0	0
6	Kepulauan Riau	30	4	13,33
7	Jambi	34	10	29,41
8	Sumatera Selatan	23	10	43,47
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	0	0
10	Lampung	30	0	0
11	Banten	8	0	0
12	DKI Jakarta	26	0	0
13	Jawa Barat	56	0	0
14	Jawa Tengah	53	0	0
15	DI Yogyakarta	30	0	0
16	Jawa Timur	30	0	0
17	Bali	15	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	30	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	8	0	0
20	Kalimantan Barat	19	0	0
21	Kalimantan Tengah	8	0	0
22	Kalimantan Timur	19	0	0
23	Kalimantan Utara	19	0	0
24	Kalimantan Selatan	23	0	0
25	Sulawesi Utara	8	0	0
26	Sulawesi Selatan	26	8	30,76
27	Sulawesi Tengah	15	0	0
28	Gorontalo	23	0	0
29	Sulawesi Tenggara	15	0	0
30	Sulawesi Barat	15	0	0
31	Maluku Utara	11	0	0
32	Maluku	11	0	0
33	Provinsi Papua	11	0	0
34	Papua Barat	11	0	0

No	Provinsi	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase (%)
	Total	755	38	5,03

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala) adalah sebagian besar Dinas KP masih terkendala dengan pemindahan akun Dekonsentrasi ke akun TP sehingga sebagian besar Dinas KP belum melakukan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan bagian program DJPB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait dengan monitoring penyakit ikan melalui anggaran tugas pembantuan. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan pendampingan pengendalian penyakit ikan tahun 2023 sebesar Rp218.312.000 dengan serapan sebesar Rp 91.632.460,- atau 41,97%.

IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Pengujian resistensi antimikroba dilaksanakan di 15 UPT- DJPB dengan target indikator kinerja sebesar 35%. Penghitungan indikator kinerja Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) diukur pada akhir tahun dan bersifat minimize yang menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat resistansi antimikrobanya maka

semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya. Jumlah sampel ikan yang diuji untuk mengetahui hasil uji yang resisten terhadap antimikroba sebanyak 735 sampel. Realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba sampai dengan triwulan II berjumlah 950 sampel atau sekitar 129,25% dari target tahunan.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)								
TW II 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	35	-	-

Tabel 20. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan II Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan II	Prosentase Realisasi (%)
1	Balai Budidaya Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	59	52	88,14
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Perikanan Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	70	80	114,29
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	70	121	172,86
4	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	34	33	97,06
5	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok	35	21	60
6	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	35	37	105,71
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam	35	51	145,71
8	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	35	32	91,43
9	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	21	10	47,62

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan II	Prosentase Realisasi (%)
10	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo	56	70	125
11	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	35	18	51,43
12	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar	35	33	94,29
13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	56	20	35,71
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeperangan (BPIU2K) Karangasem	35	31	88,57
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	124	341	275
Total		735	950	129,25

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) pada triwulan II yaitu: (1) masih terdapat UPT yang belum selesai melakukan uji identifikasi bakteri target, (2) hasil uji sensitivitas antimikroba belum dilakukan untuk semua sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan UPT DJPB agar menyampaikan data hasil uji identifikasi bakteri dan sensitivitas secara berkala.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka NSPK bidang AMR tahun 2024 sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.955.500,- hingga akhir Triwulan II sebesar 1,98%.

SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

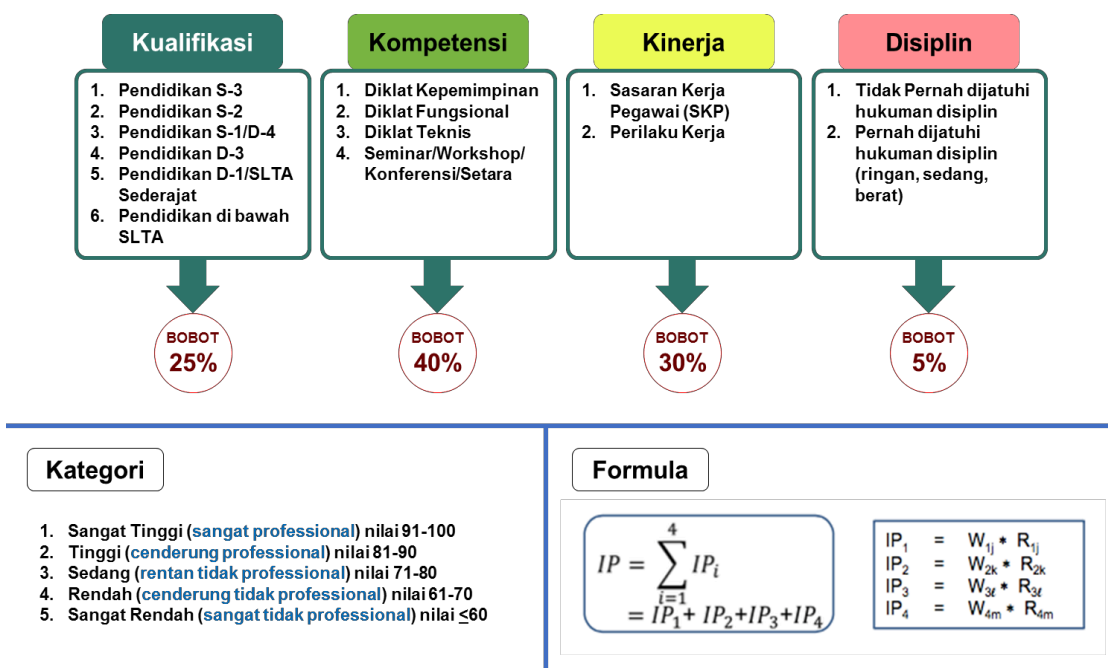
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan

yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;

2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pengukuran capaian IP ASN dilakukan pada semester 1 dan semester 2 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada akhir semester.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
80	83,49	104,36	67,97	81,41	76	85	98,22	109,85

Pada Renstra DJPB 2020-2024, telah dicantumkan target IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) sebesar 76, namun target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih besar yaitu 80. Hasil penilaian IP ASN di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan semester I yang disajikan pada dashboard IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian mencapai 83,49.

Perolehan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan penghitungan 4 (empat) komponen IP ASN Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ipasn/2024/unker/515>, meliputi: a) Kualifikasi dengan nilai 21,77; b) Kompetensi dengan nilai 29,41; c) Kinerja dengan nilai 27,31 dan d) Disiplin dengan nilai 5. Berikut merupakan perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tabel 22. Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN Semester I Tahun 2024 Lingkup DJPB

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	21,06	31.19	25,93	5.00	83.18	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21,77	29,41	27,31	5.00	83,49	Tinggi
3.	Dit Perbenihan	21,56	38.19	25	5.00	89,75	Tinggi
4.	Dit Pakan dan ObatIkan	21,35	30.71	25,68	5.00	82.74	Tinggi
5.	Dit Produksi danUsaha Budidaya	21,94	24,15	25,14	5.00	76,23	Sedang

IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	34	82	-	-

Pada Triwulan II, indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) belum tercapai dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam

pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan II, telah dilakukan enginputan data capaian Indikator Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan melalui aplikasi e kinerjaku serta penyusunan dokumen pengukuran kinerja, antara lain : Evaluasi Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Dokumen tersebut nantinya diupload di aplikasi ESR MenPan maupun ekinerjaku sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

IKM. 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan IV Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan.

$$\text{Pengukuran Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan}} \times 100\%$$

Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi Triwulan II 2024 thd Triwulan II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	95,65	119,56	100	80	80	80	103,26	103.26

Pada renstra DJPB 2020-2024 terdapat penetapan target IKU Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) pada tahun 2024 sebesar 80. Capaian IKU Triwulan I diperoleh berdasarkan hasil penghitungan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit berdasarkan Surat Nomor: B. 4621/DJPB.1/HP.620/VII/2024, 11 Juli 2024 pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I

Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II Tahun 2024).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024, unit kerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan memperoleh nilai sebesar 95,65%. Rincian capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) masing-masing Satker disampaikan pada tabel 26 berikut ini.

Tabel 25. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen PerikananBudi Daya	86,27
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	95,65
4	Direktorat Perbenihan	100
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	100

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) , yaitu mengupayakan langkah tindak lanjut terkait dengan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat T.220/ITJ/HP.550/VII/2024, 8 Juli 2024 mengenai Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP Triwulan II TA 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang didalamnya menginformasikan bahwa adanya sisa temuan yang tercantum pada LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 di Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan sisa sebanyak satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan sebesar Rp41.426.478,00 belum dilengkapi dengan bukti dukung.

IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit

kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
94	133,33	141,84	100	133,33	90	94	141,84	148,14

Target IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB 2020- 2024, dengan nilai sebesar 90%. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup DJPB dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory dengan pembobotan 20%; (ii) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dengan pembobotan 40% serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP dengan pembobotan 40%.

Pada triwulan II tahun 2024, target indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan ditargetkan angka 94 dengan realisasi 133,33 atau sebesar 141,84%. Upaya yang dilakukan terhadap tercapainya target diatas melalui: penyebarluasan informasi menggunakan platdorm Portal Collaboration Office yang diakses melalui <https://portal.kkp.go.id> (dengan mekanisme dan perhitungan yang disampaikan melalui Memorandum Nomor: 1996/DJPB.1/TU.210/VIII/2023, 30 Agustus 2023 tentang Penyampaian Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan III Lingkup KKP. Penggunaan aplikasi tersebut menggantikan aplikasi Bitrix yang telah habis lisensinya pada tanggal 25 Juni 2023.

Berkaitan dengan perbandingan pencapaian IKU Persentase unit kerja yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II telah diinformasikan melalui Nota Dinas: 1490/DJPB.1/RC.610/VII/2024, 8 Juli 2024 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup DJPB Triwulan II Tahun 2024.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Eselon II Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah melampaui target Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan nilai yang sama juga diperoleh Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan perolehan 133,33%.

IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 27. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	80	80	-	-

IKU Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan target pada tahun 2023 sebesar 80%. Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penghitungan capaian IKU Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan tahunan sehingga capaian pada triwulan II Tahun 2024 belum diketahui.

IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun 2023, Capaian indikator kinerja tersebut terdiri dari kegiatan arsiparis, rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 6 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur setiap triwulannya. Pengukuran dilakukan terhadap 6 aspek dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Nilai pengawasan arsiparis = 60%
- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 95%
- Pengelolaan BMN = 95%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

Tabel 28. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	99,18	123,975	99,16	100,02	-	80	123,975	-

IKU Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) belum ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024, disebabkan indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian indikator tersebut pada triwulan II tahun 2024 sebesar 99,18%. Perolehan angka capaian tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 31 berikut.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Nilai pengawasan arsiparis	60	0
2	Kehadiran pegawai	85	96,70
3	Pengelolaan Keuangan	95	100
4	Pengelolaan BMN	95	100

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
5	Layanan tata usaha	73	100
6	Pengelolaan SDM Aparatur	72	0
	TOTAL	80	99,18

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada Triwulan II tahun 2024, meliputi:

- **Nilai Pengawasan Arsiparis**

Nilai pengawasan arsiparis diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif, dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023 Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mendapatkan nilai 81,69 dengan predikat memuaskan sementara penilaian pengawasan arsiparis belum dilakukan.

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Terdapat penambahan pegawai PNS pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 orang sehingga jumlah Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang PNS, 6 (enam) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 7 (tujuh) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada Triwulan II tahun 2024 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

Tabel 30. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran			Persentase Kehadiran	
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar		
1	Direktur KKI	1	52	52	24	28	0	52	100,00%
2	Prasarana Kawasan Budi Daya	11	52	572	275	238	52	565	98,78%
3	Pembangunan Kawasan Budi Daya	7	52	364	242	77	0	319	87,64%
4	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	11	52	538	303	181	36	520	96,65%

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran				Persentase Kehadiran
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar	Jumlah	
5	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	13	52	676	330	341	0	671	99,26%
6	Dukungan Manajemen	11	52	572	406	149	0	555	97,03%
Total		54		2774	1580	1014	88	2682	
Persentase (%)									96,68%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kehadiran masih dibawah dari target kehadiran 100% yang dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sakit dan cuti. Gambaran jumlah pegawai yang tidak hadir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

No	Kelompok/Bidang	Jumlah Pegawai	Ketidakhadiran (hari)					Persentase ketidakhadiran (%)
			Sakit	Cuti	Izin	Alpa	Jumlah (Hari)	
1	Direktur	1	0	0	0	0	0	0,00%
2	Prasarana Kawasan Budi Daya	10	0	7	0	0	7	1,22%
3	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	13	5	40	0	0	45	12,36%
4	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	10	0	18	0	0	18	3,35%
5	Pembangunan Kawasan Budi Daya	7	0	5	0	0	5	0,74%
6	Dukungan Manajemen	12	1	16	0	0	17	2,97%
Total		54	6	86	0	0	92	
Persentase (%)								3,32%

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pada Triwulan II Tahun 2024, pengelolaan keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dapat dirinci pada Tabel 34.

Tabel 32. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun 2024

No	Proses Pembayaran	Kuantitas (Dokumen)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Jumlah SPM -LS			
	SPM LS Bendahara	50	685.862.237	100,00%
	SPM LS Pihak Ketiga	55	87.067.447.449	100,00%
2	Jumlah GUP	0	-	100,00%
3	Jumlah TUP	0	-	100,00%
Jumlah Dokumen Pengajuan Pembayaran		28	105	87.753.309.686
Prosentase (%)				100,00 %

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2024. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 33. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Akun	Kuantitas	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Barang Konsumsi (unit)	8	1.794.990.000	100%
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	100%
3	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	31	36.316.419.000	100%
Prosentase (%)				100,00 %

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat. Pada Triwulan II tahun 2024, telah direalisasikan kegiatan tersebut dengan rincian pada tabel 36 berikut.

Tabel 34. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

No	Tim Kerja	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
1	Prasarana Kawasan Budi Daya	14	14	100,00%
2	Pembangunan Kawasan Budi Daya	7	7	100,00%

No	Tim Kerja	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
3	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	7	7	100,00%
4	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	0	0	100,00%
5	Dukungan Manajemen	0	0	100,00%
Total		28	28	28
Persentase				100,00%

• Pengelolaan SDM Aparatur

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen:

- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Capaian Indeks diatas akan diketahui pada akhir tahun yang pengukurannya dilakukan oleh Bagian Pengelolaan SDM Aparatur- Seditjen Perikanan Budi Daya.

IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) tidak ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 sehingga indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dikelola pada Tahun 2023. Penanggung Jawab Indikator Kinerja tersebut berada di Kelompok Sarana dan Prasarana dan Kelompok Penataan Kawasan.

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) merupakan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan) yang dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023).

Perhitungan indikator Perhitungan indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) berdasarkan Jumlah Kusuka yang mendapat bantuan dan terdaftar KUSUKA dibandingkan dengan pelaku usaha budi daya ikan yang menerima bantuan yang hasil pengukurannya baru diketahui pada Triwulan IV.

Tabel 35. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	91	-	-

Target Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) difokuskan pada kegiatan bantuan pemerintah, berupa: excavator dan PITAP dengan target KUSUKA di masing-masing bantuan pemerintah, yaitu: 120 orang dan 80 orang.

IKM.18. Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2023 sehingga indikator tersebut tidak dicantumkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang pengukurannya dihitung berdasarkan jumlah rencana aksi yang diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan rencana aksi yang dipersentasekan. Indikator kinerja tersebut diukur secara tahunan yang seluruhnya telah tercapai sebesar 100%.

Tabel 36. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	1	-	-

IKM.19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja persentase realisasi keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan didefinisikan sebagai tingkat serapan anggaran di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Kawasan dan kesehatan ikan dibandingkan dengan pagu anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Alokasi awal anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2024 sebesar 429.050.000.000 yang diimplementasikan untuk mencapai Indikator Kinerja di setiap unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan rincian: (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp1.350.000.000; (b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 139.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000,- ; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000,- ; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan– IISAP sebesar Rp 66.600.000.000,- ; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000,-.

Pada bulan Maret 2024 terdapat revisi pagu menjadi Rp 418.602.250.000,- dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp 902.250.000,- b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 129.200.000.000,- ; (c) Sarana Perikanan Budi Daya di UPT sebesar Rp 5.800.000.000,-; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budi daya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budi daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000,-. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nila salin.

Sejak Januari 2024 hingga saat ini masih terdapat kebijakan blokir anggaran terhadap pagu anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Budi Daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000,- (Rp 50.000.000 dilakukan Automatic Adjustment (AA) dan Rp 162.100.000.000,- menunggu adanya *Loan Agreement* sebagai Rupiah Murni Pendamping) dan Infrastruktur Budi Daya Udang yang Ditingkatkan – IISAP sebesar Rp 100.000.000,- sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan sehingga pagu anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dapat dilaksanakan hanya Rp 206.402.250.000,-

Tabel 37. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
20	48,74	243,7	23,71	205,56	-	98	49,73	-

Tabel 38. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024

No	Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	902.250.000	236.036.960	666.213.040
2	QEG	Bantuan Peralatan/Sarana	129.200.000.000	80.416.254.174	48.783.745.826
3	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	5.800.000.000	5.750.750.000	49.250.000
4	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	70.500.000.000	14.203.010.244	56.296.989.756
Total			206.402.250.000	100.606.051.378	105.796.198.622
Persentase Realisasi				48,74%	

Capaian Indikator kinerja Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar 48,74% diperoleh dari pelaksanaan kegiatan: (i) **Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan** sebesar Rp 236.036.960 meliputi: NSPK bidang pengendalian residu dan NSPK bidang penyakit ikan, (ii) **Bantuan peralatan/sarana** sebesar Rp 80.416.254.174 berupa excavator yang disalurkan ke masyarakat, dan (iii) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 14.203.010.244, antara lain meliputi : (i) Penyusunan DED kawasan tambak, (ii) Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), (iii) Infrastructure Improvement of Shrimp Aquaculture Project (IISAP) dan (iv) PMO.

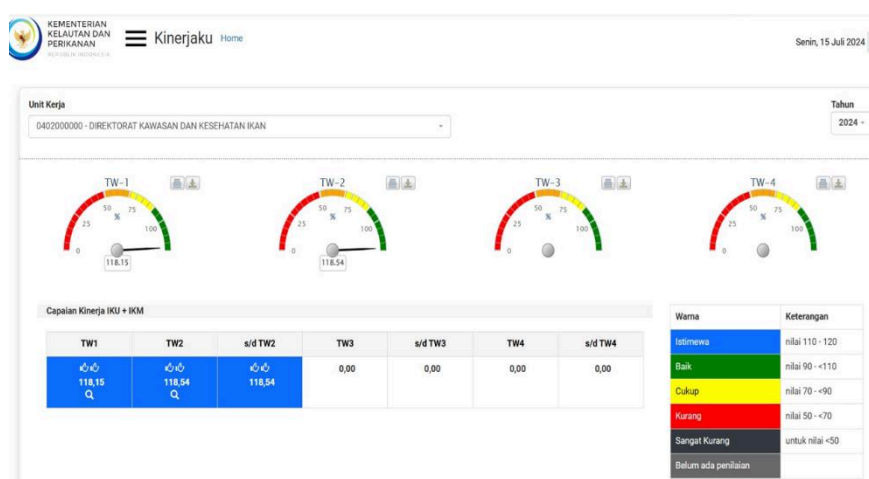
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan dan kesehatan ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode April – Juni 2024. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target tahunan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2024, dari total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan atau 100%, 2 (dua) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah target tahunan dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan II Tahun 2024 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan II mencapai nilai angka “Istimewa”



Gambar 7. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2024

B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan II Tahun 2024 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat kawasan dan Kesehatan Ikan melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024, diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja baru 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 13 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan II. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024 diantaranya:

- a. **Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)**, adanya peraturan terbaru dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga perlu rencana aksi/tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu mempelajari dan mencermati kembali dalam penyusunan AHSP sesuai dengan peraturan terbarunya.
- b. **Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)**, keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi penerima dan kendala terkait pendaftaran kusuka perorangan/korporasi oleh penyuluh.
- c. **Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan (NRMP)* (%)**, adanya peralihan pengelolaan anggaran pelaksanaan monitoring residu di Dinas Provinsi dari Anggaran Dekonstruksi menjadi Tugas Pembantuan sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaian administrasi di satker Provinsi sebelum anggaran dapat dimanfaatkan;
- d. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**, terdapat 1 (satu) temuan yang tercantum di LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 belum disertai dengan bukti dukung sehingga harus segera ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka perlu lakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan agar tidak menghambat capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan. Laporan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Triwulan berikutnya.